

Pola pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Bali Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara

Institutional patterns of mangrove ecotourism in Bali Beach, Village of Mesjid Lama District of Talawi, Batu Bara Regency, North Sumatera Province

Pesta Saulina Sitohang^{a*}, Yunasfi^a dan Ahmad Muhtadi^a

^a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pantai Bali terletak di Batu Bara dengan luas sekitar 637,22 ha dengan luas kawasan pesisir sekitar 30,6% dari total area. Penelitian ini bertujuan untuk inventarisasi sarana dan prasarana pendukung di Pantai Bali dan membuat pola pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Bali. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga April 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling untuk wawancara. Konsep manajemen ekowisata Pantai Bali sepenuhnya bergantung kepada pemerintah daerah dan memberikan izin kepada publik sebagai pengelola.

Kata kunci: Ekowisata; Pola institusional; Pantai Bali

Abstract

Bali Beach is a located in Batu Bara with an area of approximately 637.22 ha which is a coastal area about 30.6% of the total area. This study aims to inventory of facilities and supporting infrastructure in Bali Beach and create patterns of mangrove ecotourism management at Bali Beach. This research was conducted in March to April 2014. Research method used was purposive sampling for interviews. The concept of Bali Beach ecotourism management entirely to local governments and gives permission to public as the manager.

Keywords: Ecotourism; Institutional patterns; Bali Beach

1. Pendahuluan

Kabupaten Batu Bara merupakan satu diantara Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Asahan dengan luas wilayahnya mencapai ± 92.365,09 ha dan memiliki luas kawasan hutan 19.653,86 ha. Batu Bara memiliki garis pantai sepanjang 58 km dan berada di atas ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut (dpl). Kondisi pantainya sangat rentan terkikis hampasan ombak Selat Malaka (Dinas Kehutanan Batu Bara, 2006).

Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk ekowisata sejalan dengan pergeseran minat wisatawan dari *standart classic* menjadi *alternative torism*. Wisatawan yang datang tidak hanya untuk melakukan wisata semata, melainkan ada informasi dan pengetahuan baru terkait kegiatan wisata yang bersangkutan.

Pantai Bali berpotensi untuk dijadikan kawasan ekowisata mangrove. Sehingga untuk menjadikan suatu daerah menjadi kawasan wisata diperlukan suatu analisis kesesuaian wisata dimana kegiatan wisata yang dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan potensi sumberdaya dan peruntukannya. Hal ini memberikan arti bahwa penggalakan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Batu Bara selain dapat menjaga kelestarian sumberdaya dapat juga meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Menurut Yulianda (2007), wisata dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Wisata alam (*nature tourism*), merupakan aktifitas wisata yang ditujukan pada pemanfaatan sumberdaya alam menjadi daya tarik panoramanya.
2. Wisata budaya (*cultural tourism*), merupakan wisata dengan kekayaan budaya sebagai obyek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan.
3. *Ecotourism, green tourism* atau *alternative tourism*, merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumberdaya alam/lingkungan dan industri kepariwisataan.

* Korespondensi: Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
Jl. Prof. A. Sofyan No.3, Kampus USU, Medan 20155.
Tel: +62-61-8213236 Fax: +62 61 8211924
e-mail: tatatoet@yahoo.com

2. Bahan dan metode

2.1. Pengambilan data persepsi masyarakat dan pengunjung

Data dan persepsi masyarakat dan pengunjung terhadap sarana dan prasarana penunjang wisata, kualitas ekologi, pengetahuan terhadap ekowisata dan mangrove dapat. Data dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara secara terstruktur dengan responden (pedoman dengan kuisisioner). Jumlah responden menggunakan nilai galat 5% untuk masyarakat dan pengunjung. Metode pengambilan sampel/responden yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu cara pengambilan sampel dengan disengaja dengan tujuan sampel tersebut dapat mewakili setiap unsur yang ada dalam populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung yang berkunjung ke Pantai Bali dalam waktu satu bulan dan masyarakat sekitar Pantai Bali. Sampel data yang diambil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin diacu oleh Setiawan (2007):

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan: n = Ukuran sampel yang dibutuhkan
N = Ukuran populasi
d = Galat pendugaan

2.2. Analisis kelembagaan pengelolaan ekowisata mangrove

Untuk regulasi pengelolaan kawasan pesisir mengacu pada konsep pengelolaan yang dikembangkan oleh Ruddle (1998). Seperti halnya organisasi pengelolaan dengan melihat kondisi eksisting terhadap aturan main yang ada saat ini yang dibandingkan dengan kondisi yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya merumuskan/memodifikasi aturan main pengelolaan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan dimasa yang akan datang. Pola pengelolaan menurut Ruddle (1998) mengacu pada struktur kelembagaan yang terdiri atas:

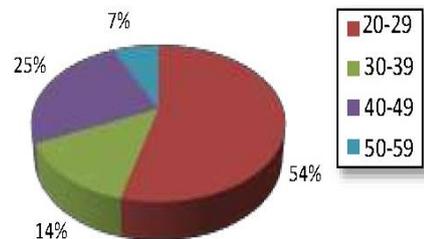
1. Kewenangan (*authority*), hal ini akan terkait dengan wilayah kekuasaan dan bagaimana system pinjam dari pemerintah kepada masyarakat.
2. Tata aturan (*rules*), hal ini akan berkaitan dengan norma/peraturan yang mengikat antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan ekowisata mangrove.
3. Hak (*right*), hal ini berkaitan dengan hak- hak kedua belah pihak yang berhubungan dengan perjanjian pemanfaatan kawasan wisata mangrove.
4. Pemanfaatan dan kontrol (*monitoring*), hal ini berkaitan dengan bagaimana pemantauan dari pihak pemerintah terhadap pelaksanaan semua aturan, norma, perjanjian maupun sanksi yang disepakati. Selain itu, keterlibatan masyarakat terhadap monitoring juga perlu dianalisis apakah perlu dilibatkan ataupun tidak.
5. Sanksi (*sanctions*), hal ini berkaitan dengan sanksi yang ditetapkan dan bagaimana pelaksanaannya.

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Hasil

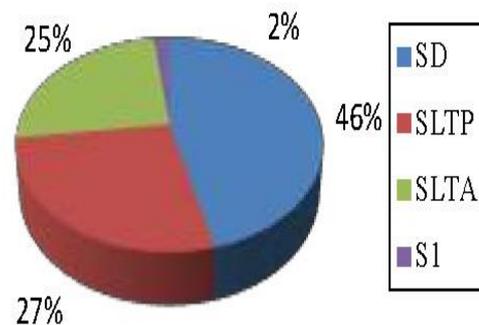
3.1.1. Karakteristik masyarakat pemanfaatan ekosistem mangrove

Masyarakat yang diwawancarai adalah masyarakat yang bermukim di kecamatan talawi dan sebagian besar masyarakat yang memanfaatkan Pantai Bali. Jumlah masyarakat sebanyak 44 orang, terdiri atas 33 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sebagian besar usia masyarakat yang memanfaatkan Pantai Bali berkisar antara 20-29 tahun dengan persentase 54%, kisaran usia 30-39 tahun adalah 14%, kisaran usia 40-49 tahun adalah 25%, kisaran usia 50-59 tahun adalah 7% dan tidak terdapat masyarakat yang usianya < 20 tahun atau > 59 tahun yang memanfaatkan Pantai Bali selama wawancara. Karakteristik usia masyarakat di Kecamatan Talawi dapat dilihat pada Gambar 1.



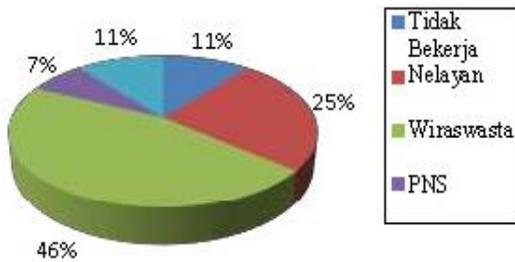
Gambar 1. Karakteristik usia masyarakat.

Secara umum pendidikan masyarakat di sekitar Pantai Bali masih rendah. Pendidikan SD sebanyak 46%, SLTP sebanyak 27%, SLTA dan sederajat sebanyak 25%, dan S1 sebanyak 2%. Karakteristik tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Karakteristik tingkat pendidikan masyarakat.

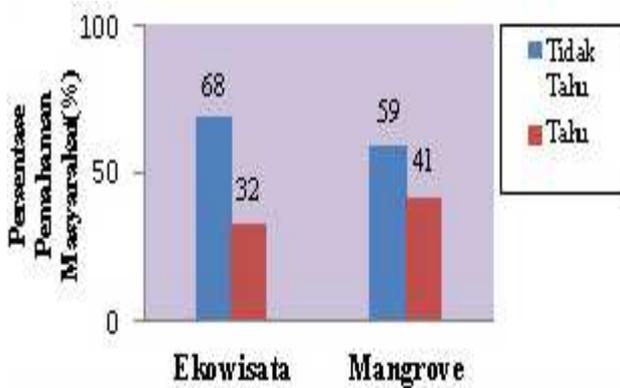
Berdasarkan karakteristik pekerjaan, terdapat masyarakat yang tidak berkerja sebanyak 11%, nelayan sebanyak 25%, wiraswasta sebanyak 46%, PNS sebanyak 7% dan lain- lain (Pengelola pantai, Guru honor, Kepala desa) sebanyak 11%. Karakteristik Pekerjaan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3. Masyarakat di Kabupaten Batu Bara terkhususnya di Kecamatan Talawi sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai petani dan nelayan (Kecamatan Talawi dalam Angka, 2012).



Gambar 3. Karakteristik pekerjaan masyarakat.

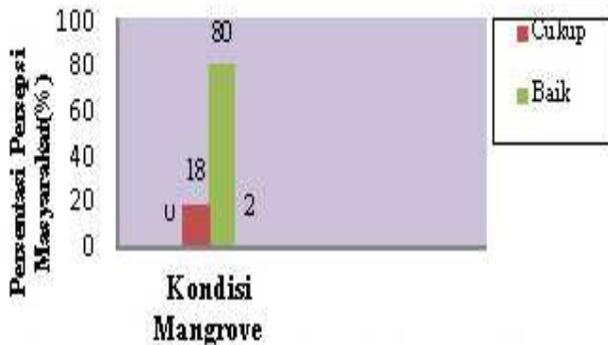
3.1.2. Pemahaman dan persepsi masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap ekosistem mangrove cukup baik. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui pengertian ekosistem mangrove secara umum dan fungsinya. Namun ada beberapa masyarakat yang sama sekali belum mengetahui tentang ekosistem mangrove dan lebih dari 50% masyarakat sekitar Pantai Bali belum mengenal istilah ekowisata. Persentasi pemahaman masyarakat terhadap ekowisata dan mangrove dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pemahaman masyarakat terhadap ekowisata dan mangrove.

Masyarakat di sekitar Pantai Bali sebagian besar mengatakan bahwa kondisi hutan mangrove yang berada di Pantai Bali berada dalam keadaan baik. Persepsi masyarakat terhadap kondisi mangrove dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Persepsi masyarakat terhadap kondisi mangrove.

Sarana dan prasarana adalah satu kunci utama yang akan mendukung keberhasilan pengembangan suatu kawasan wisata. Hasil kuisisioner masyarakat mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana yang mencakup listrik, air bersih dan tempat sampah di Pantai Bali masih dalam keadaan tidak memadai dengan kualitas kurang. Transportasi menuju daerah wisata Pantai Bali dapat digolongkan pada kondisi yang cukup baik. Persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarana dapat dilihat pada Gambar 6.



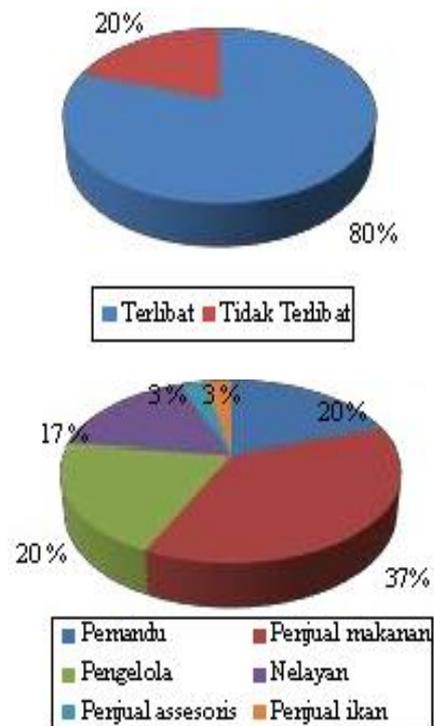
Gambar 6. Persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarana.

3.1.3. Kegiatan pemanfaatan pantai bali oleh masyarakat

Masyarakat sebagian besar melakukan kegiatan memanfaatkan Pantai Bali untuk kegiatan penangkapan ikan, udang, kepiting, lokan, budidaya kerapu dan sebagian kecil untuk kegiatan perkebunan. Alasan masyarakat melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat dan didukung dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia di daerah tersebut cukup tinggi.

3.1.4. Keterlibatan masyarakat

Satu diantara tujuan kegiatan ekowisata adalah untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekowisata sangat penting, karena merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Dari hasil wawancara, sebagian besar dari masyarakat (80%) berkeinginan untuk terlibat dalam kegiatan ekowisata dan 20% masyarakat tidak berkeinginan untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekowisata. Persentasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata dapat dilihat pada Gambar 7.

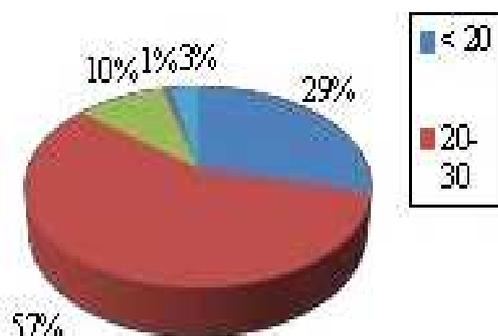


Gambar 7. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata.

Masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan ekowisata ini nantinya ada yang bersedia menjadi pemandu (guide), penjual makanan, penjual ikan, penjual assesoris, nelayan dan pengelola. Masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan ini dikarenakan lebih memilih bekerja diluar kawasan Pantai Bali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

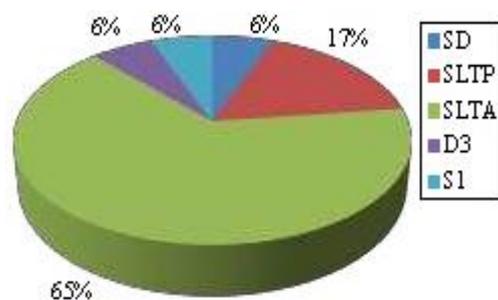
3.1.5. Karakteristik pengunjung

Jumlah pengunjung yang diwawancarai sebanyak 80 orang. Pengunjung yang diwawancarai adalah pengunjung yang datang ke Pantai Bali dan melakukan kegiatan pemanfaatan seperti kegiatan wisata. Usia pengunjung didominasi oleh kisaran usia <20 tahun sebanyak 29%, kisaran usia 20-29 tahun sebanyak 57%, kisaran usia 30-39 tahun sebanyak 10%, kisaran usia 40-49 tahun sebanyak 1% dan kisaran 50-59 tahun sebanyak 3%. Karakteristik usia pengunjung dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Karakteristik usia pengunjung.

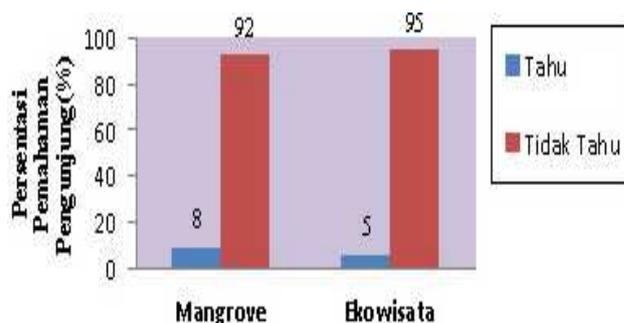
Tingkat pendidikan pengunjung sangat bervariasi. Tingkat pendidikan SD yang diperoleh dari hasil wawancara sebanyak 6%, SLTP sebanyak 17%, SLTA sebanyak 65%, D3 sebanyak 6%, dan tingkat pendidikan S1 sebanyak 6%. Karakteristik tingkat pendidikan pengunjung dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Karakteristik pendidikan pengunjung.

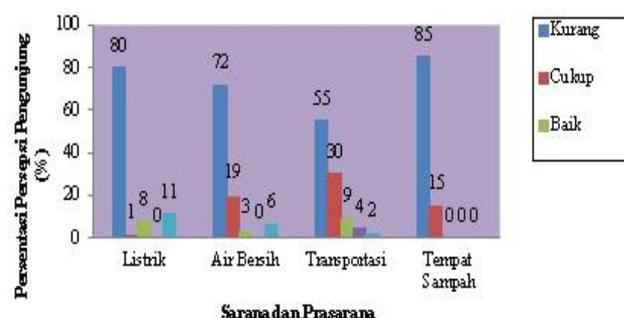
3.1.6. Pemahaman dan persepsi pengunjung

Secara umum pemahaman pengunjung tentang ekosistem mangrove dan ekowisata masih sangat rendah. Kegiatan ekowisata dalam pelaksanaannya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengunjung tentang ekosistem mangrove. Pemahaman pengunjung terhadap ekowisata dan mangrove dapat dilihat pada Gambar 10.



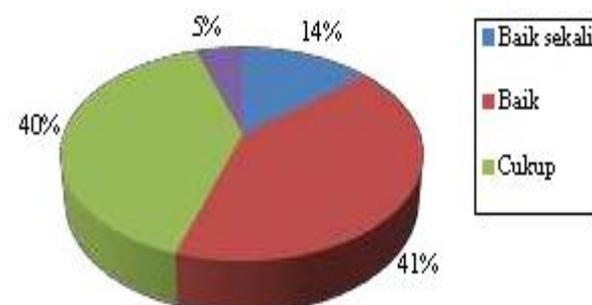
Gambar 10. Pemahaman pengunjung terhadap mangrove dan ekowisata.

Pengunjung Pantai Bali mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih, transportasi dan tempat sampah belum memadai. Persepsi pengunjung terhadap sarana dan prasarana dapat dilihat pada Gambar 11. Kegiatan wisata yang akan dikembangkan di suatu wilayah harus didukung dengan adanya fasilitas umum penunjang kegiatan, seperti kamar mandi umum, tempat sampah dan fasilitas lainnya.



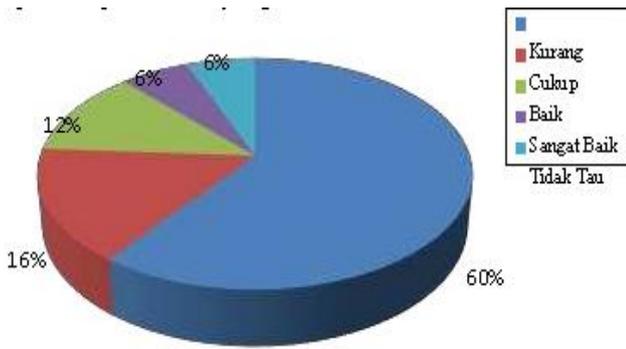
Gambar 11. Persepsi pengunjung terhadap sarana dan prasarana.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada pengunjung, daerah Pantai Bali termasuk dalam kategori yang baik dalam pemberian sambutan terhadap pengunjung oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai satu kelebihan masyarakat dalam mempromosikan daerah wisatanya, dimana pengunjung merasa nyaman untuk melakukan kegiatan wisata di daerah tersebut. Persepsi pengunjung terhadap sambutan masyarakat Pantai Bali dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Persepsi pengunjung terhadap sambutan masyarakat.

Masyarakat Pantai Bali masih kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan karena pengunjung sebagian besar masih merasa lingkungan disekitar Pantai Bali dalam keadaan yang tidak terawat (masih banyak dijumpai sampah-sampah yang berserakan). Hal ini terjadi karena masih minimnya ketersediaan prasarana dan sarana dalam penunjang kelestarian lingkungannya terutama tempat sampah. Persepsi pengunjung terhadap kesadaran masyarakat Pantai Bali dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Persepsi pengunjung terhadap kesadaran masyarakat.

3.1.7. Keinginan pengunjung berwisata mangrove di Pantai Bali

Sekitar 95% pengunjung mengatakan bersedia datang untuk berwisata mangrove dan sisanya sebanyak 5% mengatakan tidak bersedia melakukan wisata mangrove di daerah Pantai Bali. Jenis kegiatan wisata yang ditawarkan dapat mempengaruhi tingkat keinginan pengunjung untuk datang ke suatu kawasan wisata dan melakukan kegiatan wisata. Persentase keinginan pengunjung untuk berwisata mangrove di Pantai Bali dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Keinginan pengunjung untuk berwisata mangrove.

3.1.8. Organisasi pengelolaan Pantai Bali

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terjadi konflik terhadap status pengelolaan Pantai Bali yang selama ini tidak jelas. Masyarakat merasa terganggu dengan adanya pihak ke tiga yang beranggapan memiliki sepenuhnya hak pengelolaan atas pantai ini. Hal ini yang menjadi satu penyebab tidak berjalannya dengan baik suatu sistem pengelolaan di pantai tersebut. Pemerintah dalam hal ini juga tidak bertindak tegas menanggapi masalah ini dan harus ikut serta dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

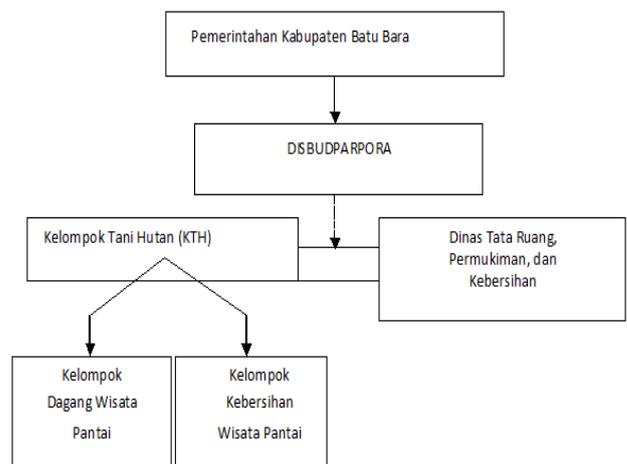
Dalam uraian diatas (berdasarkan hasil pengamatan potensi mangrove, analisis kesesuaian ekowisata mangrove, hasil wawancara terhadap masyarakat dan pengunjung serta penentuan daya dukung kawasan dan alternatif track) diperoleh kesimpulan bahwa Pantai Bali memiliki potensi yang tinggi dan sesuai dijadikan sebagai obyek ekowisata mangrove. Organisasi pengelolaan Pantai Bali untuk kegiatan ekowisata mangrove yang akan dilakukan nantinya berpusat pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai pemilik hutan lindung dan pembuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan obyek ekowisata mangrove. Pemerintah memberikan mandat kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Batu Bara sebagai dinas pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Bali. Selanjutnya Pemerintah memberikan surat izin pengelolaan pantai kepada masyarakat sekitar sebagai pengelola pihak pertama dan memiliki izin yang sah serta menetapkan peraturan-peraturan

berdasarkan diskusi bersama terhadap perencanaan, pengelolaan maupun pengembangan kawasan wisata tersebut. Pentingnya partisipasi masyarakat terutama karena masyarakat setempat berada dan tinggal di wilayah pesisir yang dikelola, sehingga partisipasi masyarakat tersebut sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Masyarakat yang terlibat merupakan masyarakat yang memiliki keinginan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam, selain itu masyarakat memiliki tanggungjawab terhadap pengembangan kawasan.

Dalam melaksanakan pengembangan kawasan mangrove menjadi suatu kawasan wisata, hal yang terpenting untuk tetap dijaga kelestariannya adalah potensi mangrove itu sendiri. Bentuk pelestarian kawasan mangrove perlu ditetapkan melalui partisipasi masyarakat dalam organisasi kawasan hutan yaitu membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Masyarakat membangun hutan mangrove bersama-sama dengan kelompoknya dan membentuk program kerja yang akan di laksanakan. Keberadaan KTH dapat tetap menjaga kelestarian mangrove yang berada di Pantai Bali.

Selanjutnya KTH membentuk kelompok dagang wisata pantai, yang sangat efektif untuk dilakukan dimana masyarakat yang berdagang di sekitar area wisata harus memiliki persetujuan berdagang dari pihak pengelola. Kelompok dagang wisata pantai ini akan semakin mempermudah pihak pengelola dalam melakukan kontrol dalam kegiatannya, selain itu kelompok dagang wisata pantai ini juga memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran dan keamanan dalam kegiatan perdagangan di Pantai Bali. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata mangrove di Pantai Bali harus disediakan dengan baik. Sarana dan prasarana yang baik menjadikan pengunjung merasa lebih nyaman dalam berwisata. Hal terpenting dalam penyediaannya adalah keberadaan tempat sampah di sekitar kawasan wisata dan penyediaan toilet umum.

Keberadaan tempat sampah sangat mempengaruhi keindahan suatu tempat wisata. Letak tempat sampah sebaiknya berada di dekat pondok-pondok dagangan masyarakat, pondok-pondok peristirahatan pengunjung, dan disekitar area tracking mangrove. Sampah yang dibawa pengunjung dalam melakukan tracking harus diperhatikan oleh pihak pengelola dan pemandu wisata mangrove dimana jumlah sampah yang dibawa sebelum dan sesudah memasuki kawasan tracking harus sama, guna menjaga kebersihan lingkungan disekitar areatracking. Pengangkutan sampah secara rutin penting untuk ditetapkan agar kebersihan kawasan wisata tetap terjaga. Masyarakat dan Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan bekerja sama dalam kegiatan ini. Organisasi Pengelolaan dan Matriks Kelembagaan ekowisata mangrove di Pantai Bali dapat dilihat pada Gambar 15 dan Tabel 1.



Gambar 15. Organisasi pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Bali.

Tabel 1

Matriks permasalahan kelembagaan, kondisi ideal dan usaha yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan.

| Komponen Kelembagaan | Kondisi Aktual | Kondisi Ideal | Usaha yang perlu dilakukan |
|-----------------------------|---|--|---|
| Kewenangan | <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan ada di pihak Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, akan tetapi terjadi ketidakjelasan pihak pengelola wisata dari pihak pemerintah yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi salah paham - Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan peran mangrove terhadap kelestarian lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan penuh ada di pihak Pemerintahan Kabupaten Batu Bara - Pemberian kewenangan kepada masyarakat sebagai pihak pengelola dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai anggota pengelolanya. | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tentang fungsi dan peran mangrove terhadap kelestarian hutan - Sosialisasi peran masyarakat terhadap pengelolaan kawasan wisata Pantai Bali - Pencabutan dan pembatalan surat izin usaha pariwisata terdahulu sesuai Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Batu Bara Nomor: 556/204/DISBUDPARPORA/BB/2013 - Pemberian surat kewenangan yang sah sebagai satu pihak pengelola dari pemerintah kepada masyarakat |
| Aturan | <ul style="list-style-type: none"> - Penjualan tiket wisata pantai yang masih liar terjadi di lapangan - Penjualan tiket dilapangan terdapat dua jenis dikarenakan pihak pengelola yang belum pasti antara masyarakat sekitar maupun dari pihak PT.Obor | <ul style="list-style-type: none"> - Penjualan tiket wisata harus sah dan disertai stempel dari pihak pengelola maupun pemerintah - Penjualan tiket wisata satu jenis berdasarkan pihak pengelola yang sah yang ditetapkan oleh pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> - Mempertegas pihak pengelola wisata Pantai Bali dari pihak pemerintah - Segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak asing terhadap kegiatan di kawasan Pantai Bali harus seizin dari pihak pengelola dan melaporkannya ke pemerintah - Setiap masyarakat yang memanfaatkan kawasan Pantai Bali dikenakan biaya /pajak, kecuali kegiatan penelitian - Tidak boleh melakukan penebangan, |
| Komponen Kelembagaan | Kondisi Aktual | Kondisi Ideal | Usaha yang perlu dilakukan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - memodifikasi dan kegiatan yang merusak mangrove dan perairan sekitarnya - Perlibatan masyarakat terhadap program kelestarian mangrove - Mengkoordinir pengujung yang melakukan <i>tracking</i> dalam pembuangan sampah pada saat melakukan <i>tracking</i> - Membuat tempat sampah guna menjaga kebersihan lingkungan pantai |
| Hak | <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mengelola Pantai termasuk memanfaatkan hasilnya - Pihak masyarakat dan perwakilan PT.Obor melakukan tindakan sebagai pengelola kawasan wisata Pantai Bali | <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang memanfaatkan Pantai memperoleh hasil dan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan - Penetapan pihak Pengelola yang sah dan hanya 1 pengelola oleh pihak pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan pihak pengelola yang sah dan pemberian tanggung jawab terhadap pengelola dalam menjaga kawasan Pantai Bali dari pihak pemerintah - Masyarakat berhak ikut terlibat dalam pengelolaan Pantai Bali - Pengelola dan masyarakat setempat berhak menegur, melaporkan ke pihak yang berwajib dan mencegah pihak-pihak yang akan melakukan kerusakan mangrove dan perairan sekitarnya |
| Kontrol | <ul style="list-style-type: none"> - Sangat jarang dilakukan pengawasan dari pihak pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan kontrol lapangan dari pihak pemerintah minimal | <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan masyarakat sebagai mandor dilapangan yang berkoordinasi dengan pihak pengelola maupun pemerintah |
| Komponen Kelembagaan | Kondisi Aktual | Kondisi Ideal | Usaha yang perlu dilakukan |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya penetapan mandor dilapangan dari pihak pemerintah maupun pengelola - Rendahnya fungsi dan peranan Pemerintah terkhususnya DISBUPARPORA dalam kontrol di lapangan - Masih minimnya data-data ekosistem mangrove yang dimiliki pihak pemerintah guna menjaga potensi yang ada di Pantai Bali | <ul style="list-style-type: none"> - sekali sebulan - Pihak pengelola yang sah diberi kesempatan ikut terlibat dalam kontrol dan tetap - memberikan laporan kepada pihak pemerintah - Minimal terdapat 1 orang perwakilan dari pihak pengelola dan masyarakat sekitar sebagai petugas lapangan | <ul style="list-style-type: none"> - sangat efektif dilakukan - Kegiatan pemantauan dari pihak pemerintah minimal dilakukan sekali sebulan dan dilakukan diskusi dengan pihak pengelola maupun masyarakat sekitar - Kegiatan pemantauan dari mandor hendaknya dilakukan sesering mungkin guna menjaga tidak terjadinya penebangan hutan secara liar dan tetap menjaga kenyamanan wisata di kawasan Pantai Bali |
| Sanksi | <ul style="list-style-type: none"> - Hanya sebatas teguran untuk penebangan mangrove yang dilakukan | <ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum yang tegas untuk pelaku penebangan hutan dan perlakuan tindak kejahatan (pencurian) di sekitar kawasan pantai Bali | <ul style="list-style-type: none"> - Jika melakukan penebangan diberikan peringatan dan hukuman harus menanam kembali mangrove seperti semula - Pemberian hukuman penjara maupun denda terhadap pelaku pencurian di sekitar kawasan wisata |

3.2. Pembahasan

3.2.1. Persepsi masyarakat di Pantai Bali

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat diperoleh karakteristik usia masyarakat yang banyak memanfaatkan Pantai Bali tertinggi pada usia 20-29 tahun yaitu sebanyak 54%. Hal ini berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat Pantai Bali yang masih rendah, dimana banyak masyarakat yang sudah bekerja di usia dini dikarenakan tidak bersekolah lagi dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan wawancara terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata mangrove, diperoleh 80%

masyarakat yang berkeinginan untuk ikut serta dalam kegiatan ekowisata mangrove. Hal ini didasari pada keinginan masyarakat memperoleh pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka serta keinginan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan Pantai Bali secara berkelanjutan. Menurut Gunawan (2013) menyatakan bahwa dukungan dan keinginan masyarakat sekitar terhadap adanya ekowisata di kawasan cagar alam pulau sempo cukup tinggi dengan nilai 83,33%. Menurut mereka adanya ekowisata akan membuat desa semakin maju dan akan memberi peluang pekerjaan baru dimasamendatang. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan untuk bisa terlibat dalam pengembangan wisata alam dengan menjadi pemandu wisata, jasa penyeberangan perahu dan membuka warung makan.

3.2.2. Persepsi pengunjung di Pantai Bali

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dilapangan diperoleh hasil karakteristik usia pengunjung yang paling banyak pada kisaran 20-29 tahun. Hal ini dikarenakan daya tarik berwisata lebih tinggi pada usia tersebut, dimana pengunjung terbanyak didominasi oleh para pelajar yang ada di Kabupaten Batu Bara. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam pengembangan ekowisata mangrove nantinya. Pemuda dan pemudi dapat memiliki tambahan wawasan lingkungan dengan diperkenalkannya ekosistem mangrove tersebut dan dapat menciptakan pemuda pemudi yang cinta akan kelestarian lingkungannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa selain berpotensi baik dalam keberadaan mangrovenya, Pantai Bali juga memiliki daya tarik dalam hal keberadaan faunanya, dimana banyak dijumpai jenis burung yang beranekaragam serta keberadaan pasir putih di pinggir pantai juga menjadikan Pantai Bali menjadi salah satu Pantai di Kabupaten Batu Bara yang sangat cocok untuk dikembangkan menjadi ekowisata mangrove. Hal ini sesuai dengan penelitian

Gunawan (2013) dan fauna merupakan modal dalam pengembangan ekowisata. Semakin banyak potensi daya tarik wisata alam yang ada pada suatu kawasan akan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung pada kawasan.

3.2.2. Kelembagaan pengelolaan ekowisata mangrove

Pola pengelolaan perlu ditetapkan dalam suatu kawasan wisata guna meminimalkan dan mencegah terjadinya konflik antar pemanfaat sumberdaya tersebut. Konflik tersebut seharusnya dapat diatasi dengan pengelolaan yang baik dan memperhatikan keseimbangan ekosistem mangrove. Salam (2000) menyatakan bahwa pendekatan ekowisata merupakan salah satu kegiatan yang relatif kecil memberikan dampak

kerusakan, dan jika dikelola dengan baik akan sesuai untuk konservasi biodiversitas dan menghasilkan nilai ekonomi.

4. Kesimpulan

1. Penyediaan air bersih, listrik, tempat sampah serta akomodasi di Pantai Bali masih dalam keadaan kurang dan penting untuk dilengkapi guna keberlangsungan kegiatan ekowisata mangrove.
2. Organisasi dan pola pengelolaan Pantai Bali didasarkan pada Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dengan menetapkan masyarakat sekitar sebagai pihak pengelola yang memiliki izin dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Bibliografi

- Dinas Kehutanan Kabupaten Batu Bara, 2006. Kondisi Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Batu Bara dalam Angka. Perupuk: Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara
- Dinas Kehutanan Kabupaten Batu Bara, 2013. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Batu Bara. Perupuk: Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Batu Bara, 2007. Pariwisata di Kabupaten Batu Bara dalam Angka. Perupuk: Kabupaten Batu Bara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sumatera Utara.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara, 2013. Kajian Kesesuaian Pelabuhan Perikanan Kabupaten Batu Bara. Tanjung Tiram: Kabupaten Batu Bara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sumatera Utara.
- Gunawan, A., Hari, P. dan Bambang, S., 2013. Peluang Usaha Ekowisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vo.10 No.4, Hal.247-263.
- Muhaerin, M., 2008. Kajian Sumberdaya Ekosistem Mangrove untuk Pengelolaan Ekowisata di Estuaria Perancak, Jembrana, Bali. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nugraha, A.K., Hidayah, Z., 2009. Perbandingan Fluktuasi Muka Air Laut (MLR) di Perairan Pantai Utara Jawa Timur dengan Perairan Selatan Jawa Timur. Jurnal Kelautan Vol. 2 (1) ISSN: 1907-9931.
- Salam, M.A., Ross, L.G., and Beveridge, M.C.M., 2000. Eco-tourism to protect the reserve mangrove forest the sundarbans and its flora and fauna. Jurnal Anatolia 11 (1): 56-66.
- Setiawan, N., 2007. Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Yulianda, F., 2007. Ekowisata Bahari sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi. Makalah Seminar Sains 21 Februari 2007. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK. Institut Pertanian Bogor, Bogor.